

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Rangkang Education, Tangerang.
- Arifin Abdul Rachman, 2001, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Makmur, 2015, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidarta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Cetakan ke-X*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- ., 2014, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan ke-11*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saefullah Sule dan Erni Tri Kurniawan, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, PT. Alumni, Bandung.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia, Cetakan Keempat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Jurnal Ilmiah/Buletin:**

- Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Konsep dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VII Nomor 3 September 2010, Lembaga Pengembangan Administrasi STIA LAN Bandung.
- Billy W. L. Masinambow dan Pierre H. Gosal, 2020, *"Tantangan dan Peluang Dunia Jasa Konstruksi di Tengah Pandemi Covid-19"*, Jurnal Media Matrasain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Sulawesi Utara, Vol. 17 No. 1 Maret 2020.
- Ivan Fauzani Raharja, 2014, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Inovatif Volume VII Nomor II Mei 2014.
- Meylina Hasbullah, 2020, *Stay at Home if You Can, Go to Work if You Must*, Buletin Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI., Edisi 4 Tahun 2020.
- Ratih Fitriani, 2020, *Mengintip Panduan Pengendalian Covid-19 Sektor Konstruksi oleh OSHA*, Buletin Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI., Edisi 4 Tahun 2020.

### **Berita Resmi Badan Pusat Statistik:**

- Berita Resmi Statistik No. 85/11/Th.XXIII, 5 November 2020
- Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.

### **Website Resmi:**

- Website *World Health Organization (WHO)* <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (*WHO Director - General's opening remarks at the media briefing on Covid-19*).
- Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 <https://lpse.gorutkab.go.id/eproc4>

**Pedoman Resmi:**

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Edisi Revisi Ke-5.

**Berita *Online Media Mainstream*:**

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/12002701/ini-pengumuman-lengkap-jokowi-soal-2-wni-positif-corona?page=all> (Pengumuman Kasus Pertama Covid-19 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan).

<https://www.youtube.com/watch?v=0p2yS0GuGZA> / Konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh dr. Reisa Broto Asmoro selaku Tim Komunikasi Publik GT PCC-19 Nasional pada 11 Juli 2020.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah dilakukan ubah dalam Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Peraturan Pemerintah Nomor: 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/PRT/M/2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Instruksi Menteri PUPR (Inmen PUPR) Nomor: 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Secara garis besar Inmen PUPR tersebut memuat mekanisme tentang protokol kesehatan Covid-19 dalam penyelenggaraan konstruksi.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 66/SE/M/2015 Tahun 2015 Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendisiplinan Protokol Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disesase 2019* (Covid-19) Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi Gorontalo (Pergub Gorontalo 23/2020), yang disahkan pada 4 Juni 2020.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 114/11/III/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.109.III.2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.210.VI.2020 Tanggal 25 Juni 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: SK.27.I.2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Kepala BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 360/BPBD/014/IX/2020 Tentang Penetapan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.